

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD dan hasilnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai umpan balik (*feedback*) kepada pemerintah daerah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang APBD Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun 2016;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun 2016 jo Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

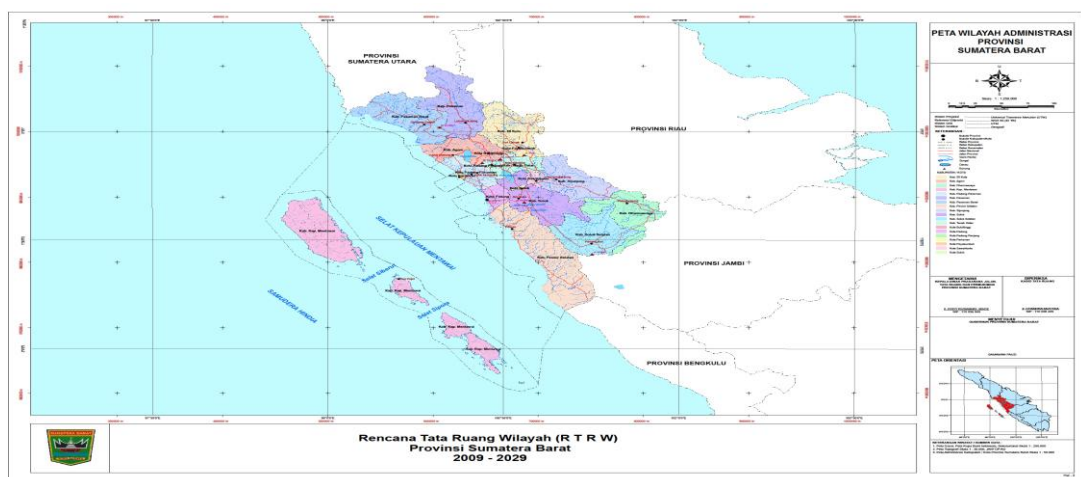
BAB I	Pendahuluan
BAB II	Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB III	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB V	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
BAB VI	Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
BAB VII	Penutup

B. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara $98^{\circ} 36'$ - $101^{\circ} 53'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara sampai dengan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan, dengan luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ Km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ Km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ Km}$ sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ Km}$. Perairan laut ini memiliki 180 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota (12 kabupaten dan 7 kota) yang mempunyai 179 kecamatan dengan 245 kelurahan, 759 nagari dan 126 desa dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat seperti Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029

Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol

Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,78°C dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,67% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 994,69 mb. Pengaruh letak ini, maka menurut ketinggiannya, wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dengan kondisi topografi tersebut di atas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan lahannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk itu diharapkan pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara optimal, harus terlebih dahulu secara seksama memperhatikan kondisi lahan dengan tidak mengabaikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Euroasia di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang

ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, yang dihitung dari jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah lebih dari 6 bulan, total penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 berjumlah 4.865.33 ribu jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 2.409,2 ribu jiwa dan perempuan 2.456,1 ribu jiwa.

Sedangkan hasil proyeksi penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat totalnya adalah 5.259,5 ribu jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 2.617,2 ribu jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 2.642,3 ribu jiwa.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan

sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011 – 2016

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten						
Kep.Mentawai	78.215	79.976	81.840	83.603	85.295	86.981
Pesisir Selatan	434.884	438.891	442.681	446.479	450.186	453.822
Solok	352.814	355.628	353.383	361.095	363.684	366.213
Sijunjung	206.584	210.675	214.560	218.588	222.512	226.300
Tanah Datar	340.906	341.911	342.864	343.875	344.828	345.706
Padang						
Pariaman	395.420	398.223	400.890	403.530	406.076	408.612
Agam	460.818	465.018	468.970	472.995	476.881	480.722
Limapuluh Kota	353.915	357.772	361.645	365.389	368.985	372.568
Pasaman	257.511	260.674	263.838	266.888	269.883	272.804
Solok Selatan	147.884	150.885	153.943	156.901	159.796	162.724
Dharmasraya	198.273	204.510	210.686	216.928	223.112	229.313
Pasaman Barat	375.314	384.206	392.907	401.624	410.307	418.785
Kota						
Padang	850.306	863.401	876.670	889.561	902.413	914.968
Solok	60.904	62.198	63.541	64.819	66.106	67.307
Sawahlunto	57.681	58.419	58.972	59.608	60.186	60.778
Padang Panjang	47.982	48.719	49.536	50.208	50.883	51.712
Bukittinggi	113.903	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
Payakumbuh	119.372	121.502	123.654	125.690	127.826	129.807
Pariaman	80.426	81.501	82.636	83.610	84.709	85.691
SUMBAR	4.933.112	5.000.184	5.066.476	5.131.882	5.196.289	5.259.528

Sumber Data : BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Berdasarkan hasil sensus penduduk dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebesar 1,23% jika dibandingkan dengan penduduk pada Tahun 2015. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2015 yang dihitung berdasarkan e-KTP adalah sebanyak 5.452.274 jiwa dengan rincian penduduk menurut jumlah laki-laki sebanyak 2.758.043 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2.694.231 orang, dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK
1	Kabupaten Pesisir Selatan	516.719
2	Kabupaten Solok	374.676
3	Kabupaten Tanah Datar	365.040
4	Kabupaten Agam	523.335
5	Kabupaten Pasaman	314.530
6	Kabupaten Padang Pariaman	460.742
7	Kabupaten Limapuluh Kota	372.949
8	Kabupaten Solok Selatan	176.931
9	Kabupaten Sijunjung	232.749
10	Kabupaten Dharmasraya	204.149
11	Kabupaten Kep.Mentawai	83.267
12	Kabupaten Pasaman Barat	427.358
13	Kota Padang	881.128
14	Kota Padang Panjang	52.935
15	Kota Bukittinggi	115.639
16	Kota Payakumbuh	129.362
17	Kota Solok	67.942
18	Kota Sawahlunto	64.106
19	Kota Pariaman	88.717
TOTAL		5.452.274

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan e-KTP Tahun 2016

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	<u>Kabupaten</u>			
1	Pesisir Selatan	262.416	254.303	516.719
2	Solok	190.078	184.598	374.676
3	Sijunjung	118.042	114.707	232.749
4	Tanah Datar	182.954	182.086	365.040
5	P. Pariaman	234.146	226.596	460.742
6	Agam	264.555	258.780	523.335
7	Limapuluh Kota	186.608	186.341	372.949
8	Pasaman	158.662	155.868	314.530
9	Kep. Mentawai	43.551	39.716	83.267
10	Dharmasraya	104.132	100.017	204.149

11	Solok Selatan	90.695	86.236	176.931
12	Pasaman Barat	217.877	209.481	427.358
	Kota			
13	Padang	443.839	437.289	881.128
14	Solok	34.027	33.915	67.942
15	Sawahlunto	32.100	32.006	64.106
16	P. Panjang	26.701	26.234	52.935
17	Bukittinggi	57.930	57.709	115.639
18	Payakumbuh	65.016	64.346	129.362
19	Pariaman	44.714	44.003	88.717
Sumatera Barat		2.758.043	2.694.231	5.452.274

Sumber Data : Biro Pemerintahan Setdaprov. Sumatera Barat Tahun 2016

3. Kondisi Kemiskinan

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan yang digunakan untuk mengklarifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin.

Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2016 adalah Rp.438.075,- (kapita/bulan). Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan. Pada bulan September 2016, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 76,32 %. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 80,33 %, lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 70,86 %. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2016. Jika dibandingkan antara September 2016 dengan Maret 2016, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 2,98 %. Sedangkan di daerah perdesaan meningkat 2,83 %. Jika dilihat menurut komponennya maka terjadi perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di daerah perdesaan garis kemiskinan non makanan mengalami perubahan yang lebih besar daripada garis kemiskinan makanan, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret 2012-September 2015

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Perkotaan					
Maret 2012	223.796	85.317	309.113	127,81	6,67
Sept 2012	232.153	88.975	321.128	124,25	6,45
Maret 2013	235.317	97.520	332.837	119,53	6,17
Sept 2013	261.644	99.124	360.768	124,89	6,38
Maret 2014	269.473	105.495	374.968	108.076	5.43
Sept 2014	282.276	108.587	390.862	108.532	5,41
Maret 2015	288.410	117.925	406.335	118.034	5,73
Sept 2015	301.356	121.984	423.339	118.480	5,73
Maret 2016	312.154	129.369	441.523	118.962	5,54
Sept 2016	322.168	132.506	454.674	119.510	5,52
Pedesaan					
Maret 2012	207.242	50.733	257.975	276,93	9,14
Sept 2012	219.987	53.668	273.655	273,60	8,99
Maret 2013	231.942	56.272	288.215	287,94	9,39
Sept 2013	257.459	63.792	321.252	255,74	8,30
Maret 2014	268.291	65.220	333.511	271.120	8,68
Sept 2014	279.289	70.535	349.824	246.206	7,84
Maret 2015	293.768	75.985	369.753	261.575	8,33
Sept 2015	313.294	77.884	391.178	231.050	7,35
Maret 2016	332.415	81.375	413.790	252.593	8,16
Sept 2016	341.816	83.703	425.520	257.000	8,27
Kota + Desa					
Maret 2012	213.655	64.129	277.784	404,74	8,18
Sept 2012	224.702	67.350	292.052	397,86	8,00
Maret 2013	233.250	72.252	305.502	407,47	8,14
Sept 2013	259.085	77.521	336.606	380,63	7,56
Maret 2014	268.751	80.904	349.656	379,19	7,41
Sept 2014	280.453	85.374	365.827	354.74	6,89
Maret 2015	291.641	92.637	384.277	379.609	7,31
Sept 2015	308.554	95.393	403.947	349.530	6,71
Maret 2016	326.993	98.148	425.141	371.555	7,09
Sept 2016	334.358	103.717	438.075	376.510	7,14

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.04/01/13/Th XX/3 Januari 2017

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, yang dirilis dalam Berita Resmi Statistik Nomor 04/01/13/Th XX/ 3 Januari 2017, dimana untuk

mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi September 2016 adalah 376.510 jiwa, mengalami kenaikan 4.955 jiwa (1,33%) dibanding Maret 2016. (data SUSENAS dikeluarkan 2 kali setahun yaitu pada bulan Maret dan September).

Lebih dari dua pertiga penduduk miskin atau tepatnya 68,26 % penduduk miskin tinggal di perdesaan, lebihnya sekitar 31,74 % penduduk miskin tinggal di perkotaan, seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2010 – September 2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Maret 2010	106.181	323.843	430.024	6,84	10,88	9,50
Maret 2011	141.240	303.198	444.438	7,42	10,07	9,04
Sept 2011	145.988	298.782	444.770	7,61	9,85	8,99
Maret 2012	128.817	279.138	407.955	6,67	9,14	8,19
Sept 2012	125.388	276.133	410.521	6,45	8,99	8,00
Maret 2013	120.604	290.518	411.121	6,16	9,39	8,14
Sept 2013	126.024	258.061	384.085	6,38	8,30	7,56
Maret 2014	108.076	271.120	379.196	5,43	8,68	7,41
Sept 2014	108.532	246.206	354.738	5,41	7,84	6,89
Maret 2015	118.034	261.575	379.609	5,73	8,35	7,31
Sept 2015	118.481	231.048	349.529	5,73	7,35	6,71
Maret 2016	118.962	252.593	371.555	5,54	8,16	7,09
Sept 2016	119.510	257.000	376.510	5,52	8,27	7,14

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.04/01/13/Th XX/3 Januari 2017

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan

gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2012	0,942	1,248	1,129
September 2012	1,132	1,300	1,235
Maret 2013	0,999	1,019	1,011
September 2013	1,117	1,363	1,267
Maret 2014	0,654	1,122	0,940
September 2014	0,536	0,888	0,751
Maret 2015	0,785	1,104	0,977
September 2015	1,056	1,392	1,259
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
P2			
Maret 2012	0,213	0,343	0,293
September 2012	0,296	0,322	0,312
Maret 2013	0,238	0,191	0,209
September 2013	0,292	0,313	0,305
Maret 2014	0,125	0,278	0,219
September 2014	0,096	0,181	0,148
Maret 2015	0,161	0,224	0,211
September 2015	0,245	0,320	0,290
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278

Sumber Data :Berita Resmi Statistik No.04/01/13/Th XX/3 Januari 2017

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari Maret 2016 ke September 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk miskin makin menjauh dari garis kemiskinan. Kondisi tersebut bersifat negatif bagi upaya pengentasan kemiskinan. Begitu juga jika dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan

maka indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan maupun perkotaan mengalami peningkatan. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terlihat bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga mengalami kenaikan. Indeks untuk daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga meningkat.

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th XIX yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tanggal 7 November 2016, keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada Agustus 2016 menunjukkan perkembangan positif di pasar tenaga kerja Sumatera Barat, yang digambarkan dengan naiknya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan disertai dengan turunnya tingkat pengangguran dibandingkan kondisi Agustus 2015 (dihitung dua kali setahun yaitu bulan Februari dan Agustus).

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 berkurang sebanyak 103,23 ribu orang dibanding keadaan Februari 2016, tetapi bertambah sebanyak 127,65 orang dibanding keadaan Agustus 2015. Secara persentase, penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 berkurang 3,27 % dibanding keadaan Februari 2016, namun mengalami peningkatan 7,48 % jika dibanding dengan keadaan setahun yang lalu (Agustus 2015).

Jumlah penganggur pada Agustus 2016 mengalami penurunan, yaitu sebanyak 23,78 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2016 dan lebih rendah 35,66 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2015. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama kurun waktu setahun ini relatif stabil dengan sedikit penurunan, dari 70,34 % di Februari 2016 menjadi 67,08 % di Agustus 2016, seperti terlihat pada tabel 1.7 berikut ini.

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

Tahun 2014-2016

KEGIATAN UTAMA	AGUST 2014	2015		2016	
		Feb	Agust	Feb	Agust
1. Angkatan Kerja (000 Orang)	2.331,99	2.480,83	2.346,16	2.577,04	2.473,81
a. Bekerja	2.180,33	2.332,15	2.184,60	2.427,35	2.347,91
b. Pengangguran	151,66	148,68	161,56	149,69	125,90
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,19	68,73	64,56	70,34	67,08
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,50	5,99	6,89	5,81	5,09
4. Pekerja Tidak Penuh	804,7	871,24	740,45	873,62	762,85
a. Setengah Penganggur (000 Orang)	256,32	317,41	249,29	314,96	252,99
b. Paruh Waktu	548,38	553,83	491,16	558,66	509,86

Sumber : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XIX Tanggal 7 November 2016

Selanjutnya struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2016 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tiga besar sektor penyumbang penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat adalah sektor Pertanian (36,44%), sektor Perdagangan (22,04%) dan sektor Jasa Kemasyarakatan (17,67%). Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015, jumlah penduduk yang bekerja disetiap sektor mengalami kenaikan, termasuk di dua sektor utama, yaitu : sektor Perdagangan bertambah sebanyak 6,40 ribu pekerja (atau naik 1,25 %), dan jasa kemasyarakatan sebanyak 38,87 ribu orang (atau naik 10,344%).

Sektor konstruksi mengalami kenaikan paling sedikit (879 orang atau bertambah 0,77%), dibandingkan dengan sektor lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air) yang mencatat pertambahan sebesar 36,34 ribu pekerja (atau sekitar 94,10%).

Satu-satunya sektor yang mengalami penurunan jumlah pekerja adalah sektor pertanian, dimana perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja di

sektor ini dari Agustus 2015 ke Agustus 2016 mengalami penurunan sebesar 854 orang (atau turun sekitar 0,10%), seperti tabel berikut ini.

Tabel 1.8
Penduduk Usia 15 Tahun KE ATAS YANG BEKERJA
MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA KONDISI AGUSTUS 2011 -
2016 DI PROVINSI SUMATERA BARAT (RIBU ORANG)

NO	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian	813,7	827,3	817,9	818,7	856,4	855,6
2	Industri	153,1	159,0	132,3	149,5	146,0	206,0
3	Perdagangan	441,8	431,8	472,8	487,1	511,1	517,6
4	Jasa Kemasyarakatan	347,7	325,9	354,4	419,0	376,0	414,9
5	Lainnya*)	314,4	293,6	283,7	306,1	295,1	353,8
TOTAL		2.070,7	2.037,6	2.061,1	2.180,3	2.184,6	2.347,9

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th XVIII, 5 November 2015

Ket : *) Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari enam kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan hal itu, maka pada Agustus 2016 sebanyak 896,91 ribu orang (38,20%) bekerja pada kegiatan formal dan 1,45 juta orang (61,80%) bekerja pada kegiatan informal.

Dalam setahun terakhir (Agustus 2015-Agustus 2016), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap, bertambah 28,36 ribu orang dan penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan bertambah sebanyak 91,15 ribu orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sekitar 119,50 ribu orang atau secara persentase naik sebesar 15,37 %. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir, pekerja informal secara absolut bertambah sebanyak 43,81 ribu orang (naik sebesar 3,11%), seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.9

LKPD Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016

**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2012-Agustus 2016 (ribu orang)**

NO	STATUS PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Berusaha Sendiri	442,4 (21,71%)	475,4 (23,07%)	524,6 (24,06%)	464,5 (21,26%)	411,26 (17,52%)
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	345,1 (16,94%)	364,7 (17,69%)	383,1 (17,57%)	382,4 (17,5%)	402,99 (17,16%)
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	97,8 (4,80%)	96,1 (4,66%)	95,5 (4,38%)	80,2 (3,67%)	108,63 (4,63%)
4	Buruh/Karyawan	629,3 (30,88%)	636,3 (30,87%)	678,4 (31,11%)	697,1 (31,91%)	788,28 (33,57%)
5	Pekerja Bebas	230,5 (11,31%)	198,7 (9,64%)	216,5 (9,93%)	260,2 (11,91%)	280,26 (11,94%)
6	Pekerja Tak Dibayar	292,5 (14,36%)	289,9 (14,07%)	282,1 (12,94%)	299,9 (13,73%)	356,49 (15,18%)
TOTAL		2.037,6 (100%)	2.061,1 (100%)	2.180,3 (100%)	2.184,6 (100%)	2.347,9 (100%)

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XIX, Tanggal 07 November 2016

Komposisi jumlah penduduk yang bekerja menurut jam kerja seluruhnya selama seminggu yang lalu tidak mengalami perubahan berarti dari waktu ke waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu pada Agustus 2016 jumlahnya mencapai 1,59 juta orang (67,51%). Sementara itu, dalam setahun terakhir pekerja tidak penuh jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) naik sebanyak 22,40 ribu orang (3,02%). Disisi lain, penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Agustus 2016 mencapai 184,37 ribu orang, terdapat kenaikan sebesar 24,66 % jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 (147,90 ribu orang), seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Jumlah Jam Kerja Perminggu di Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2011- 2016 (%)**

NO	JUMLAH JAM KERJA	AGUSTUS					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	1-7	2,04	2,00	3,02	1,88	1,80	1,95
2	8-14	5,84	5,94	8,11	5,69	4,97	5,89
3	15-24	13,94	14,75	17,96	14,35	12,59	11,48
4	25-34	14,64	16,86	14,36	14,99	14,53	13,15
5	1-34	36,46	39,55	43,45	36,91	33,89	32,49
6	35+*)	63,54	60,45	56,55	63,09	66,11	67,50

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XIX, Tanggal 07 November 2016

Ket : *) Termasuk Sementara Tidak bekerja

Sementara penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 873,67 ribu orang (37,21%) dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 426,35 ribu (18,15%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 347,15 ribu orang mencakup 100,37 ribu orang (4,27%) berpendidikan Diploma dan sebanyak 246,78 ribu orang (10,51%) berpendidikan Universitas.

Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja berpendidikan rendah naik sekitar 17,95 ribu orang dari sebanyak 1,28 juta orang (58,46%) pada Agustus 2015 menjadi 1,30 juta orang (55,16%) pada Agustus 2016. Sementara jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi, juga naik dari 274,19 ribu orang (12,55%) pada Agustus 2015 menjadi 347,15 ribu orang (14,79%) pada Agustus 2016, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.11
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi
Agustus 2011-Agustus 2016 (Persen)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI	AGUSTUS					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD ke Bawah	42,24	42,59	42,26	41,34	39,34	37,22
2	Sekolah Menengah Pertama	20,64	19,36	19,40	19,40	19,12	17,95
3	Sekolah	18,37	17,97	17,29	18,01	19,52	18,15

	Menengah Atas						
4	Sekolah Menengah Kejuruan	8,52	9,22	9,32	9,43	9,47	11,89
5	Diploma I/II/III	4,23	3,50	3,52	3,47	3,08	4,27
6	Universitas	6,01	7,35	8,22	8,35	9,47	10,51
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XIX, Tanggal 07 November 2016

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan pada Agustus 2016 mencapai 125,90 ribu orang, dengan TPT sebesar 5,09 %, turun dari TPT Februari 2016 sebesar 5,81 % dan TPT Agustus 2015 sebesar 6,89 %. Pada Agustus 2016, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 8,17 %, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 7,46 %. Sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,63 %. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015, TPT pada tingkat pendidikan menengah ke bawah mengalami penurunan di tingkat pendidikan SD ke bawah, tetapi meningkat di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan pendidikan menengah ke atas, mengalami penurunan angka TPT di tiap level pendidikan.

Tabel 1.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011-Agustus 2016(Persen)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI	AGUSTUS					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD ke Bawah	3,34	3,87	3,85	3,90	2,98	2,63
2	Sekolah Menengah Pertama/MTs	7,12	6,42	6,13	6,19	3,80	4,43
3	Sekolah Menengah Atas/MA	10,98	10,58	11,23	9,22	12,30	8,17
4	Sekolah Menengah Kejuruan	9,59	9,54	13,00	11,15	,32	7,46
5	Diploma I/II/III	4,09	5,15	6,98	5,79	11,25	6,71
6	Universitas	7,75	8,07	8,30	8,46	8,23	5,76
JUMLAH		6,45	6,52	7,02	6,50	6,89	5,09

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XIX, Tanggal 07 November 2016

5. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru yang dirilis Tahun 2015, dimana IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk antara lain dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) serta standar hidup layak (decent standard of living).

Angka harapan hidup saat lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

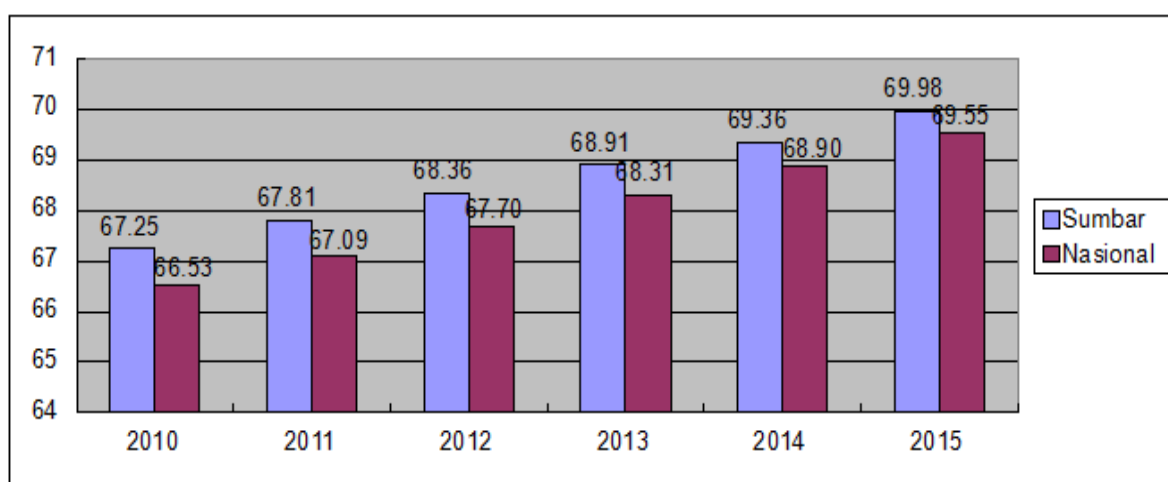
Hasil perhitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan penghitungan metode baru pada Tahun 2015 (angka tahun 2016 belum keluar dari BPS) adalah 69,98 dengan rincian komponen angka harapan hidup saat lahir adalah 68,66 tahun, harapan lama sekolah 13,60 tahun, rata-rata lama sekolah 8,42 tahun dan pengeluaran perkapita

disesuaikan Rp.9.804 (Ribu/Orang/Tahun), seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.13.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	67,59	67,79	68,00	68,21	68,32	68,66
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,22	12,52	12,81	13,16	13,48	13,60
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,13	8,20	8,27	8,28	8,29	8,42
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Orang /Th)	9.339	9.409	9.479	9.570	9.621	9.804
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT			67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016 (diolah)

Untuk 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada Tahun 2015, IPM tertinggi adalah Kota Padang sebesar 80,36 dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 57,41, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.14
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011-2015

KABUPATEN/ KOTA	I P M					PERINGKAT IPM				
	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2015
Kep. Mentawai	55,90	56,10	56,33	56,73	57,41	19	19	19	19	19
Pesisir Selatan	65,80	66,49	67,31	67,75	68,07	12	11	11	11	11
Kab.Solok	65,28	65,62	66,15	66,44	67,12	13	14	14	14	14
Sijunjung	62,92	63,70	64,48	64,95	65,30	16	16	16	16	16
Tanah Datar	66,92	67,29	68,12	68,51	69,49	10	10	10	10	10
Pdg Pariaman	65,89	66,20	67,15	67,56	68,04	11	12	12	12	12
Agam	66,94	67,95	68,73	69,32	69,84	9	8	8	8	8
Limapuluh kota	65,20	65,87	66,30	66,78	67,65	14	13	13	13	13
Pasaman	61,57	62,26	62,91	63,33	64,01	18	18	18	18	18
Solok Selatan	64,81	65,12	65,86	66,29	67,09	15	15	15	15	15
Dharmasraya	67,40	67,76	68,71	69,27	69,84	8	9	9	9	9
Pasaman Barat	62,55	63,33	63,92	64,56	65,26	17	17	17	17	17
Padang	78,68	79,00	79,23	79,83	80,36	1	1	1	1	1
Kota Solok	74,68	75,02	75,54	76,20	76,83	4	4	4	4	4
Sawahlunto	67,97	68,59	69,07	69,61	69,87	7	7	7	7	7
Pdg Panjang	73,76	74,22	74,54	75,05	75,98	5	5	5	5	5
Bukittinggi	76,30	76,92	77,67	78,02	78,72	2	2	2	2	2
Payakumbuh	75,39	75,89	76,34	76,49	77,42	3	3	3	3	3
Pariaman	73,07	73,47	74,51	74,66	74,98	6	6	6	6	6
SUMATERA BARAT	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98	9	9	9	9	9

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016

Salah satu komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah (RLS) untuk melihat jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2015, RLS yang tertinggi berada di Kota Padang Panjang sebesar 11,09 tahun, diikuti oleh Kota Padang 10,97 tahun, Kota Bukittinggi 10,79 tahun, dan Kota Solok 10,77 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata lama sekolahnya adalah 6,19 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.15.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2011-2015 (Tahun)

KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
Kep. Mentawai	6,15	6,16	6,17	6,19	6,27
Pesisir Selatan	7,57	7,79	8,05	8,10	8,11
Kab.Solok	7,30	7,44	7,53	7,56	7,57
Sijunjung	7,10	7,20	7,30	7,32	7,33
Tanah Datar	7,58	7,63	7,78	7,80	7,93
Pdg Pariaman	6,68	6,77	6,86	6,88	6,89
Agam	7,68	7,91	8,09	8,10	8,17
Limapuluh kota	7,40	7,52	7,58	7,59	7,91
Pasaman	7,37	7,48	7,60	7,62	7,63
Solok Selatan	7,40	7,44	7,80	7,97	7,98
Dharmasraya	7,83	7,88	7,94	7,99	8,03
Pasaman Barat	7,24	7,39	7,50	7,53	7,83
Padang	10,52	10,75	10,89	10,93	10,97
Kota Solok	10,30	10,35	10,72	10,75	10,77
Sawahlunto	9,05	9,32	9,45	9,65	9,66
Pdg Panjang	10,19	10,36	10,53	10,79	11,09
Bukittinggi	10,56	10,62	10,66	10,71	10,79
Payakumbuh	9,68	9,83	9,93	9,96	10,29
Pariaman	9,27	9,32	9,88	9,94	9,96
SUMATERA BARAT	8,20	8,27	8,28	8,29	8,42

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Komponen pembentukan IPM yang lain adalah Angka Harapan Hidup, yang memperlihatkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan, terlihat Angka Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2010-2015 tidak terlalu jauh berbeda, dimana pada Tahun 2010 sebesar 67,59 tahun dan pada Tahun 2015 usia harapan hidup menjadi 68,66 tahun, seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli di Sumatera Barat terlihat pada tahun 2010 adalah Rp.9.339.000,-/Orang/Tahun menjadi Rp.9.804.000,-/Orang/Tahun pada Tahun 2015. Pengeluaran perkapita yang tertinggi di Sumatera Barat adalah Kota Padang sebesar Rp.13.522.000,-/Orang/Tahun, diikuti oleh Kota Payakumbuh sebesar Rp.12.622.000,-/Orang/Tahun, Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.330.000,-/Orang/Tahun. Sedangkan yang terendah pengeluaran perkapitanya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai

sebesar Rp.5.684.000,-/Orang/Tahun. Perkembangan pengeluaran perkapita di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.16
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2011-2015 (Rupiah/Orang/Tahun)

KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014	2015
Kep. Mentawai	5.381	5.409	5.451	5.566	5.684
Pesisir Selatan	7.980	8.131	8.233	8.368	8.412
Kab.Solok	8.754	8.824	9.118	9.228	9.334
Sijunjung	9.146	9.359	9.599	9.726	9.796
Tanah Datar	9.567	9.719	9.893	10.014	10.103
Pdg Pariaman	9.795	9.866	9.937	9.990	10.260
Agam	8.478	8.509	8.637	8.692	8.859
Limapuluh kota	8.354	8.451	8.568	8.672	8.774
Pasaman	6.830	6.888	6.964	7.058	7.340
Solok Selatan	9.024	9.147	9.291	9.390	9.653
Dharmasraya	10.434	10.470	10.505	10.550	10.713
Pasaman Barat	7.624	7.707	7.809	7.897	8.109
Padang	13.237	13.280	13.339	13.387	13.522
Kota Solok	10.596	10.689	10.784	10.927	11.350
Sawahlunto	8.428	8.537	8.665	8.780	8.931
Pdg Panjang	9.185	9.246	9.307	9.369	9.670
Bukittinggi	11.728	11.856	12.002	12.137	12.330
Payakumbuh	12.037	12.116	12.212	12.296	12.622
Pariaman	11.473	11.490	11.508	11.541	11.814
SUMATERA BARAT	9.409	9.479	9.570	9.621	9.804

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2016

6. Kondisi Perekonomian

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.195,68 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp.37,21 juta atau US\$ 2.783,07 US\$. Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016 tumbuh 5,26 % melambat dibanding Tahun 2015 sebesar 5,52 %. Dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 % Tahun 2015 menjadi 1,96 % di Tahun 2016. Dari sisi pengeluaran,

perlambatan disebabkan oleh melemahnya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dari 4,36 % di Tahun 2015 menjadi 1,20 % di Tahun 2016.

Tabel 1.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Persen)

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.72	4.61	2.63	3.42	5.86	4.33	1.96
2. Pertambangan dan Penggalian	6.56	5.15	5.82	7.61	4.34	3.58	2.00
3. Industri Pengolahan	2.18	4.74	6.46	5.14	5.40	1.84	4.90
4. Pengadaan Listrik & Gas	-1.11	4.90	8.14	3.56	8.68	0.84	10.94
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5.47	4.22	3.69	4.92	3.89	5.99	6.40
6. Konstruksi	8.58	7.80	9.96	10.30	6.58	6.85	6.59
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.92	5.92	8.62	6.31	5.30	5.10	5.32
8. Transportasi dan Pergudangan	9.02	8.53	7.77	8.47	7.51	8.07	7.65
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.62	4.76	5.29	5.90	6.44	6.85	11.15
10. Informasi dan Komunikasi	14.18	9.24	11.75	9.11	8.37	9.86	9.17
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.28	9.30	9.79	6.27	5.14	3.63	8.03
12. Real Estate	4.84	4.05	4.60	5.50	5.56	5.30	5.37
13. Jasa Perusahaan	6.47	4.93	5.96	7.30	6.97	6.15	5.63
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.29	8.85	0.16	1.75	1.95	4.71	4.96
15. Jasa Pendidikan	12.70	8.45	10.13	8.39	6.18	8.92	8.49
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	9.08	8.11	10.55	7.76	7.97	7.27	4.58

Sosial							
17. Jasa Lainnya	6.96	5.98	6.79	5.30	6.52	7.46	9.95
PDRB SUMATERA BARAT	5.60	6.34	6,31	6,02	5.85	5.41	5.26

Sumber Data : Berita Resmi Statistik Sumbar No.9/02/13/Th.XX, 6Februari 2017

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha Tahun 2016 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 24,22 %, Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor 14,92 % serta Transportasi dan Pergudangan 11,93 %, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.18
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Di Sumatera Barat, Tahun 2010-2016

LAPANGAN USAHA	STRUKTUR EKONOMI						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	25.97	25.74	25.02	24.68	25.00	24,84	24,22
2. Pertambangan dan Penggalian	4.55	4.46	4.44	4.60	4.88	4,94	
3. Industri Pengolahan	11.69	11.71	11.53	11.02	10.57	10,25	
4. Pengadaan Listrik & Gas	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0,09	
5. Pengadaan Air	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0,09	
6. Konstruksi	7.88	8.04	8.37	8.77	9,11	9,45	
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.14	15.05	15.11	14.77	14.40	14,68	14,92
8. Transportasi dan Pergudangan	10.42	10.62	10.58	11.23	11.78	12,05	11,93
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.02	1.03	1.05	1.07	1.12	1,22	
10. Informasi dan Komunikasi	5.49	5.40	5.56	5.26	5.12	4,79	
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.89	2.94	3.16	3.15	3.10	3,12	
12. Real Estate	2.05	1.98	1.92	1.93	1.97	2,01	
13. Jasa Perusahaan	0.44	0.42	0.42	0.43	0.42	0,43	

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.32	6.37	6.39	6.29	5,88	5,43	
15. Jasa Pendidikan	3.21	3.32	3.46	3.69	3.60	3,71	
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.20	1.23	1.32	1.34	1.28	1,26	
17. Jasa Lainnya	1.53	1.51	1.51	1.62	1.62	1,64	
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100	100	

Sumber Data : Berita Resmi Statistik Sumbar No.9/02/13/Th.XX, 6 Februari 2017

Sementara dari sisi pengeluaran, stimulus fiskal pemerintah baik berupa konsumsi maupun investasi pemerintah menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2016, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,39 % naik dari Tahun 2015 sebesar 4,30 %, diikuti oleh pengeluaran konsumsi lembaga non profit tumbuh sebesar 4,67 %, pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 3,36 %, sedangkan laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 1,20 %, sedangkan ekspor barang dan jasa luar negeri turun 12,84 %.

Selanjutnya untuk nilai ekspor Sumatera Barat Januari sampai Desember 2016 tercatat pada BPS Provinsi Sumatera Barat dalam Berita Resmi Statistik Tanggal 16 Januari 2017 sebesar US\$ 1.708,1 juta atau turun sebesar 2,28 % dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar US\$ 1.748,0 juta. Golongan barang ekspor pada Tahun 2016 yang paling besar adalah lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$ 1.177,1 juta diikuti oleh golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 358,9 juta, berbagai produk kimia sebesar US\$ 28,9 juta. Bila dilihat peranan golongan barang terhadap total ekspor Januari – Desember 2016 sebesar 68,91 % merupakan ekspor dari golongan lemak dan minyak hewan/nabati dan golongan karet dan barang dari karet mempunyai peranan sebesar 21,01 %.

Negara tujuan ekspor yang tercatat pada selama Tahun 2016 terbesar adalah India sebesar US\$ 653,5 juta diikuti negara Amerika Serikat sebesar US\$ 342,1 juta, Singapura sebesar US\$ 200,6 juta dan Bangladesh sebesar

US\$ 68,3 juta serta Tiongkok sebesar US\$ 58,6 juta. Persentase peranan ekspor non migas total dari bulan Januari – Desember 2016 terlihat bahwa ekspor ke negara India memiliki peran yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat yaitu sebesar 38,26 %, berikutnya ekspor ke Amerika Serikat sebesar 20,03 % dan Singapura sebesar 11,75 %, seperti terlihat pada tabel ekspor non migas menurut negara tujuan.

Tabel 1.19
Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan Tahun 2016

NO	NEGARA TUJUAN	NILAI EKSPOR JUTA US\$	% TERHADAP EKSPOR
1	India	653,5	38,26
2	Amerika Serikat	342,1	20,03
3	Singapura	200,6	11,75
4	Tiongkok	58,6	3,43
5	Belanda	50,1	2,93
6	Bangladesh	68,3	4,00
7	Selandia Baru	13,4	0,79
8	Inggris	43,5	2,55
9	Myanmar	32,2	1,88
10	Jepang	18,4	1,08
11	Lainnya	227,4	13,31
TOTAL EKSPOR		1.708,1	100

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.05/01/13/Th.XX, 16 Januari 2017

Peranan dan perkembangan ekspor non migas Sumatera Barat menurut sektor terlihat bahwa ekspor produk industri memberikan kontribusi sebesar 97,18 %, pertanian sebesar 1,92 % sedangkan hasil tambang dan lainnya sebesar 0,89 %, seperti terlihat pada tabel 1.20 berikut ini.

Tabel 1.20
Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Sektor
Tahun 2015-2016

NO	SEKTOR	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)		% PERAN TERHADAP EKSPOR JAN- DES 2016
		2015	2016	

1	Industri	1.697,2	1.660,0	97,18
2	Pertanian	38,0	32,9	1,92
3	Hasil Tambang dan Lainnya	12,9	15,3	0,89
TOTAL EKSPOR		1.748,0	1.708,1	100,0

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.05/01/13/Th.XX, 16 Januari 2017

Pada Tahun 2016, tercatat nilai ekspor non migas Sumatera Barat semuanya berasal dari pelabuhan muat Teluk Bayur dan dari pelabuhan muat Bandara Internasional Minangkabau tidak ada sama sekali. Ekspor melalui pelabuhan muat Teluk Bayur ini mengalami peningkatan sebesar 18,63 % dibandingkan sebesar 16,98 % dibandingkan dari Tahun 2015, seperti dalam tabel 21 berikut ini.

Tabel 1.21
Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Pelabuhan Muat
Tahun 2015-2016

NO	PELABUHAN MUAT	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)		% TERHADAP EKSPOR
		2015	2016	
1	Teluk Bayur	1.748,0	1.708,1	100
2	Bandara Inter. Minangkabau	-	-	-
TOTAL EKSPOR		1.748,0	1.708,1	100

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.05/01/13/Th.XX, 16 Januari 2017

Sementara dari Impor Sumatera Barat secara kumulatif Januari s.d. Desember 2015 mencapai US\$ 630,2 juta sedangkan pada Januari s.d. Desember 2016 mencapai US\$ 345,2 juta atau mengalami penurunan sebesar 45,44 %. Golongan barang yang terbesar diimport adalah bahan bakar mineral sebesar 79,29 %, seperti tabel berikut ini.

Tabel 1.22
Impor Beberapa Golongan Barang di Sumatera Barat Tahun 2016

NO	GOLONGAN BARANG	NILAI IMPOR JUTA US\$	% TERHADAP IMPOR
1	Bahan bakar mineral	273,7	79,29
2	Pupuk	21,3	6,18
3	Garam,Belerang,Kapur	6,9	2,00

4	Kertas/Karton	5,6	1,63
5	Mesin-mesin/Peralatan Mekanik	5,6	1,63
6	Lainnya	32,0	9,27
TOTAL IMPOR		345,2	100

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.05/01/13/Th.XX, 16 Januari 2017

Impor menurut negara asal yang tercatat pada selama Tahun 2016 terbesar adalah Singapura sebesar US\$ 227,8 juta yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 65,97 seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.23
Impor Sumatera Barat Menurut Negara Asal Tahun 2016

NO	NEGARA TUJUAN	NILAI IMPOR JUTA US\$	% TERHADAP IMPOR
1	Singapura	227,8	65,97
2	Kanada	8,3	2,41
3	Oman	4,5	1,31
4	Malaysia	48,0	13,91
5	Swedia	2,3	0,68
6	Lainnya	54,3	15,71
TOTAL IMPOR		345,2	100

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.05/01/13/Th.XX, 16 Januari 2017

Untuk impor menurut pelabuhan bongkar di Sumatera Barat, semuanya berasal dari pelabuhan bongkar Teluk Bayur. Impor melalui pelabuhan bongkar Teluk Bayur ini sebesar US\$ 345,2 juta atau 99,99 % dari nilai total impor, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.24
Impor Sumatera Barat Menurut Pelabuhan Bongkar Tahun 2016

NO	PELABUHAN MUAT	NILAI IMPOR (JUTA US\$)		% TERHADAP IMPOR
		2015	2016	
1	Teluk Bayur	632,7	345,2	100
2	Bandara Inter. Minangkabau	0,1	0,0	-
TOTAL EKSPOR		632,8	345,2	100

Sumber Data: Berita Resmi Statistik, No.05/01/13/Th.XX, 16 Januari 2017

Perekonomian di Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dimana barometer inflasi di Sumatera Barat adalah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Laju inflasi tahun kalender Kota Padang sampai Desember 2016 adalah sebesar 5,02 % dengan angka yang sama untuk laju *inflasi year on year* (Desember 2016 terhadap Desember 2015). Sedangkan di Kota Bukittinggi laju inflasi tahun kalender sampai Desember 2016 adalah 3,93 %

dan angka yang sama untuk inflasi year on year, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.25
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Year on Year Kota Padang dan Kota Bukittinggi Bulan Desember 2016 (Persen)

INFLASI	KOTA PADANG	KOTA BUKITTINGGI
Desember	0,07	-0,57
Desember (Tahun Kalender)	5,02	3,93
Desember (Tahun n) terhadap Desember (Tahun n-1) (Year on Year)	5,02	3,93

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.01/01/13/Th.XX, 3 Januari 2017

Bila diperhatikan andil selama Tahun 2016, di Kota Padang, enam kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain : kelompok bahan makanan sebesar 2,88 %, kelompok makanan jadi, minuman , rokok dan tembakau sebesar 0,95 %, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,51 %, kelompok sandang sebesar 0,10 %, kelompok kesehatan sebesar 0,23 %, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,36 %, sementara kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan memberikan sumbangan deflasi dengan angka mendekati 0,00 %.

Sementara di Kota Bukittinggi pada Tahun 2016, juga terdapat enam kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi antara lain : kelompok bahan makanan sebesar 2,17 %, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,17 %, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,39 %, kelompok sandang sebesar 0,09 % dan kelompok kesehatan sebesar 0,08 % dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,35 % sedangkan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil deflasi sebesar 0,31 %.

Indikator lain dalam meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat adalah pariwisata, dimana Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik di Indonesia. Dari sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, memperluas dan

memeratakan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa.

Perkembangan industri pariwisata tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) dan rata-rata lama menginap untuk tamu asing dan tamu dalam negeri. Dari tiga indikator tersebut dapat mencerminkan perkembangan pariwisata di Sumatera Barat.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur pada bulan Januari - Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,45 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Wisman bulan Desember 2016 ini memberikan kontribusi sebesar 0,50 % terhadap total wisman yang berkunjung ke Indonesia (wisman nasional 1.035.612 orang).

Tabel 1.26
Wisman Yang Berkunjung ke Sumatera Barat Menurut Kebangsaan
Tahun 2015-2016 (Orang)

NO	KEBANGSAAN	2015	2016
1	Malaysia	36.262	38.453
2	Australia	1.734	2.473
3	Thailand	243	275
4	Perancis	418	475
5	Inggris	334	366
6	Jerman	167	219
7	Singapura	203	235
8	Amerika	264	399
9	Tiongkok	346	390
10	Jepang	214	180
11	Lainnya	8.570	6.221
TOTAL WISMAN		48.755	49.686

Sumber : Berita Resmi Statistik No.11/02/13/Th.XX, 16 Februari 2016

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Desember 2016 mencapai rata-rata 61,51 % atau mengalami peningkatan sebesar 0,73 poin dibanding TPK November 2016 yang tercatat sebesar 60,78 %. Kota Padang menempati TKP tertinggi sebesar 64,70 %, disusul Kota Bukittinggi dengan sebesar 63,77 %. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang Bulan Desember

2016 tercapat selama 1,51 hari dan pada akomodasi lainnya tercatat selama 1,11 hari.